



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI PRIJONO
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 659393

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.320.000.000

1. Tanah Seluas 1062 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/72 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1216 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 436 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 1300 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 190.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 781 m²/350 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/187 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 248.000.000



1.	MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.	
	190.000.000	
2.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.	
	3.000.000	
3.	MOBIL, JEEP WILLYS Tahun 1952, HASIL SENDIRI Rp.	
	55.000.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 301.340.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 3.478.661.374
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total		Rp. 10.348.001.374
III. HUTANG		Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 10.348.001.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.